

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT

Gloria Elisabet Jokbet Sayuri

NPP. 32.1108

Asdaf Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: 32.1108@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Cynthia Febri Sri Indarti, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research is motivated by the suboptimal implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in Manokwari Regency in supporting the development planning process. Although the national policy through Permendagri Number 70 of 2019 has been implemented, various obstacles such as limited human resources, technical infrastructure, and coordination between regional devices are still significant obstacles. Previous studies have generally focused on developed areas and have not reviewed the West Papua context in depth. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of the SIPD policy in Manokwari Regency by highlighting the organizational process, understanding of policy implementers, and implementation of the system in supporting regional development planning. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with a post-positivist approach. Data collection techniques are carried out through in-depth interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out using the Miles, Huberman, and Saldana models, and data validity is tested through triangulation of sources and methods. **Results:** The results of the study indicate that the organizational aspect is not yet fully solid, the interpretation of policy implementers is still diverse, and the application aspect of the SIPD system faces technical obstacles and weak coordination between OPDs. Despite improvement initiatives such as training and the development of internal SOPs, the implementation of SIPD is still in the development stage. **Conclusion:** This study concludes that the success of SIPD implementation in Manokwari Regency is highly dependent on institutional strengthening, increasing human resource capacity, and more operational infrastructure and regulatory support. This finding reinforces the importance of a contextual approach in the implementation of information system policies in 3T (underdeveloped, frontier, and outermost) areas.

Keywords: Regional Government Information System (SIPD), Policy Implementation, Development Planning, Manokwari Regency.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih belum optimalnya implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Manokwari dalam mendukung proses perencanaan pembangunan. Meskipun kebijakan nasional melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 telah diterapkan, berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknis, dan koordinasi antar-perangkat daerah masih menjadi hambatan yang signifikan. Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada wilayah maju dan belum banyak mengulas konteks Papua Barat secara mendalam. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan SIPD di Kabupaten Manokwari dengan menyoroti proses organisasi, pemahaman pelaksana kebijakan, serta pelaksanaan sistem dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan postpositivisme. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana, serta validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek organisasi belum sepenuhnya solid, interpretasi pelaksana kebijakan masih beragam, dan aspek aplikasi sistem SIPD menghadapi hambatan teknis serta kelemahan koordinasi antar-OPD. Meskipun terdapat inisiatif perbaikan seperti pelatihan dan penyusunan SOP internal, implementasi SIPD masih berada pada tahap pengembangan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD di Kabupaten Manokwari sangat bergantung pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan dukungan infrastruktur serta regulasi yang lebih operasional. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan kontekstual dalam implementasi kebijakan sistem informasi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). **Kata kunci:** Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Implementasi Kebijakan, Perencanaan Pembangunan, Kabupaten Manokwari.

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam merancang dan mengelola rencana pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Hal ini ditujukan agar suatu daerah dapat leluasa dalam mengelola pemerintahan serta keberagaman yang ada pada daerah itu sendiri (Maulydiana & Simangunsong, 2021). Dan yang lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan (Christia & Ispriyarso, 2019). Sejalan dengan Agustin (2025) dimana Dalam tatanan pemerintahan, digitalisasi digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda mendorong daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan yang komprehensif sebagai bagian dari sistem

perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Muttaqin et al., 2023). Namun, hingga saat ini masih banyak daerah menghadapi kendala dalam implementasinya, baik dari aspek teknis, sumber daya manusia, maupun koordinasi antar perangkat daerah (Teken & Romarina, 2024; Triwahyuni & Fatmawati, 2024).

Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan menjadi alat strategis untuk merumuskan arah kebijakan, sasaran, serta prioritas program kerja pemerintahan daerah. Salah satu komponen penting yang menunjang keberhasilan perencanaan pembangunan adalah ketersediaan data dan informasi yang akurat, terkini, dan dapat diakses secara cepat serta transparan oleh semua pihak, termasuk masyarakat. Keberhasilan implementasi e-government di daerah tertinggal sangat dipengaruhi oleh kesiapan SDM lokal dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital. Oleh karena itu, pengembangan dan implementasi sistem informasi pemerintahan menjadi keharusan bagi daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Teken & Romarina, 2024).

Sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta memperkuatnya melalui Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tahun 2020. Implementasi reformasi tata kelola spesifik konteks yang berhasil memerlukan peraturan turunan yang disesuaikan di tingkat kabupaten dan kota, desain kebijakan inklusif yang melibatkan aktor lokal, dan koordinasi antarpemerintah yang kuat (Yulivestra et al., 2025). Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam pelayanan publik terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pemerintahan di era digital (Daraba *et al.*, 2023). Penggunaan teknologi badan pemerintahan digunakan memberikan suatu pelayanan publik diutamakan untuk dilakukan karena dengan bantuan teknologi informasi dapat memberikan kontribusi sehingga pengelolaan akan lebih cepat, tidak terbatas dengan jarak dan waktu (Muttaqin et al., 2023). SIPD adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk mendokumentasikan, mengelola, dan menyajikan informasi pembangunan dan keuangan daerah secara terintegrasi dan nasional. SIPD bertujuan meningkatkan keterbukaan informasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta mendukung perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (Dione, 2024). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD sangat dipengaruhi oleh kesiapan internal daerah, kapasitas aparatur, serta adaptasi teknologi yang berkelanjutan. Di sisi lain, studi internasional juga mengungkapkan pentingnya tata kelola data, partisipasi pengguna, serta interkoneksi sistem sebagai kunci utama keberhasilan sistem informasi publik (Janssen *et al.*, 2017).

Efektivitas implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada tata kelola dan kapasitas kelembagaan lokal yang mampu merespons kebijakan pusat secara adaptif. Ndraha (2003) juga menekankan pentingnya proses pembudayaan sistem informasi dalam organisasi publik sebagai bagian dari manajemen perubahan birokrasi. Kabupaten Manokwari, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Papua Barat, mulai mengadopsi SIPD sejak tahun 2021. Implementasi SIPD di daerah ini dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan mencakup seluruh siklus perencanaan: dari RPJPD, RPJMD, Renstra, hingga RKPD. Namun, dalam praktiknya, implementasi SIPD belum berjalan

optimal. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pemahaman SDM di lingkup perangkat daerah, terbatasnya jaringan infrastruktur internet, dan kurangnya koordinasi lintas perangkat daerah (Triwahyuni & Fatmawati, 2024).

Data capaian keterisian dokumen SIPD Kabupaten Manokwari menunjukkan adanya penurunan dari 51% di tahun 2022 menjadi 49% di tahun 2023, yang berdampak terhadap rendahnya capaian indikator kinerja utama pembangunan daerah. Tujuh perangkat daerah tercatat mengalami kesulitan teknis dalam penginputan data SIPD, di antaranya dinas teknis dan kecamatan. Selain itu, hanya 10 orang personil yang tergabung dalam tim implementor SIPD, yang harus menangani beban kerja yang cukup besar dan kompleks (Bancin et al., 2024). Sebagaimana dijelaskan oleh Phaphoom et al. (2017), adopsi sistem informasi di sektor publik memerlukan dukungan budaya organisasi dan infrastruktur yang memadai agar dapat menghasilkan manfaat maksimal. Sementara studi oleh Jones (dalam Triwahyuni & Fatmawati, 2024) menekankan pentingnya aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan sebagai kunci implementasi kebijakan yang efektif.

Penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam implementasi SIPD di Kabupaten Manokwari. Fokusnya adalah menganalisis kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya, serta mengidentifikasi upaya yang telah atau dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas SIPD. Menurut Bancin dkk (2024), efektivitas SIPD dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dan dukungan serta dedikasi administrasi pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah sekaligus masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan sistem informasi pemerintahan daerah.

I.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun kebijakan terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah diberlakukan secara nasional melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, implementasinya di berbagai daerah masih menunjukkan variasi efektivitas yang signifikan. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas aspek teknis maupun manajerial SIPD di berbagai kabupaten/kota, namun sebagian besar belum secara spesifik menyoroti konteks geografis dan sosial unik seperti yang dihadapi Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Penelitian oleh Dione (2024) dan Teken & Romarina (2024) menekankan pentingnya dukungan regulasi dan kesiapan teknologi dalam keberhasilan implementasi SIPD. Namun, belum banyak penelitian yang menggali secara mendalam tantangan implementasi SIPD dalam wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia terbatas, serta tantangan koordinasi lintas perangkat daerah seperti yang terjadi di Manokwari.

Selain itu, studi oleh Muttaqin et al. (2023) menunjukkan efektivitas SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan, namun tidak membahas kaitannya secara langsung dengan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi fokus utama BAPPEDA. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan penelitian antara penerapan SIPD sebagai alat bantu keuangan dan perannya dalam mendukung siklus perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh (Karundeng et al., 2021)

Beberapa penelitian internasional seperti yang dilakukan oleh Phaphoom et al. (2017) juga lebih banyak menyoroti adopsi teknologi cloud dalam sektor publik secara umum, namun belum secara spesifik mengaitkan hal tersebut dengan kondisi teknis di wilayah dengan keterbatasan jaringan seperti Manokwari. Studi dari Triwahyuni & Fatmawati (2024) sudah mulai mengarah pada identifikasi tantangan SIPD di tingkat daerah, tetapi masih terbatas pada aspek penatausahaan keuangan, bukan perencanaan pembangunan daerah.

Penelitian oleh Wibowo dan Wahyuni (2021) juga menyoroti perlunya integrasi antara kebijakan pusat dan praktik lokal dalam penerapan SIPD, namun belum membahas konteks Papua Barat secara komprehensif. Begitu pula dengan temuan Chairina & Wehartaty (2019), yang menunjukkan bahwa kendala komunikasi antar perangkat daerah menjadi tantangan utama dalam konsistensi pengisian data SIPD. Penelitian ini memperkuat urgensi perlunya kajian kontekstual terhadap praktik implementasi SIPD di daerah dengan kompleksitas tinggi seperti Manokwari. Penelitian oleh Janssen et al. (2017) menyoroti pentingnya keterlibatan pengguna akhir dan fleksibilitas sistem informasi untuk meningkatkan adaptabilitas di sektor publik. Temuan ini sangat relevan ketika diterapkan pada daerah yang memiliki keterbatasan teknis dan budaya organisasi yang beragam seperti di wilayah timur Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan kajian yang mendalam tentang bagaimana implementasi SIPD berjalan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari. Fokus diberikan pada kondisi aktual di lapangan, seperti kemampuan teknis operator SIPD, kualitas data perencanaan, dukungan infrastruktur, serta strategi penanganan hambatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis dan teoretis dalam pengembangan kebijakan publik berbasis sistem informasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

I.3. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan kajian literatur dari berbagai riset terdahulu terkait penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam aspek perencanaan. Kajian ini bertujuan untuk mencari referensi yang relevan serta memperkaya landasan teori untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Melalui aplikasi *Publish or Perish (PoP)*, peneliti menjangkau berbagai publikasi ilmiah dengan kata kunci "Implementasi SIPD" dan "Perencanaan Pembangunan" pada rentang waktu tahun 2019 hingga 2024. Hasil literatur tersebut kemudian dianalisis untuk memahami kecenderungan dan ruang lingkup penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian oleh Afrilia Bella Karundeng dkk. (2021) menyoroti penerapan SIPD di Kabupaten Sitaro yang telah berjalan sesuai ketentuan, meskipun belum memiliki regulasi lokal berupa Perda sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Aurel Riza Prameswari Arifin (2021) meneliti efektivitas SIPD dalam mendukung perencanaan anggaran di Kabupaten Jombang, yang menunjukkan integrasi yang baik antara dokumen perencanaan dan strategi kinerja organisasi. Sementara itu, Tumija & Erlambang (2023) mengungkapkan bahwa masih terdapat hambatan dalam implementasi SIPD, seperti kendala jaringan, kapasitas SDM yang belum optimal, serta kurangnya koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD), yang menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan sistem informasi berbasis elektronik di daerah.

Penelitian oleh Teken dan Romarina (2024) di Kota Denpasar menunjukkan bahwa SIPD berkontribusi positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, terutama melalui efisiensi proses perencanaan dan pelaporan. Namun, tantangan teknis dan kualitas input data masih menjadi catatan penting. Sementara itu, Dione (2024) melalui studi kasus di Kota Bengkulu menemukan bahwa SIPD mampu meningkatkan koordinasi pembangunan daerah, khususnya dalam penyelarasan dokumen perencanaan lintas sektor, meskipun adopsi sistem masih membutuhkan pendampingan intensif.

Dari kelima penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian terdahulu berfokus pada aspek teknis implementasi dan efektivitas SIPD dalam penganggaran. Belum banyak studi yang secara spesifik mengkaji dukungan SIPD terhadap penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah, terutama pada konteks wilayah timur Indonesia seperti Kabupaten Manokwari. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi strategis dan kontribusi orisinal dalam mengisi celah literatur tersebut.

I.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah (*novelty*) dalam kajian implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan fokus khusus pada proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, pendekatan penelitian dilakukan secara mendalam di wilayah timur Indonesia yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan infrastruktur yang berbeda dibandingkan daerah lain yang lebih maju secara administratif maupun digital. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada daerah di Jawa dan Sumatera, sementara konteks Papua Barat masih belum banyak dijelajahi dalam kajian akademik.

Kedua, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek teknis dari sistem informasi, tetapi juga menganalisis hambatan implementatif dalam hubungan antarlembaga, ketersediaan data, koordinasi antar-OPD, serta kapasitas SDM dalam pemanfaatan SIPD secara optimal. Aspek ini jarang dibahas secara menyeluruh dalam penelitian terdahulu, terutama dalam konteks perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah.

Ketiga, penelitian ini memperkaya pendekatan metodologis dengan menggunakan analisis tematik berdasarkan model implementasi kebijakan publik oleh Charles O. Jones, serta mengaitkannya dengan dinamika sistem informasi pemerintahan daerah. Model ini memberikan kerangka berpikir yang sistematis dalam melihat proses implementasi dari tahap organisasi, interpretasi hingga aplikasi kebijakan SIPD di lapangan.

Keempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis bagi penyempurnaan kebijakan implementasi SIPD oleh pemerintah pusat, terutama dalam merumuskan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual bagi daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Dengan menyoroti kondisi riil Kabupaten Manokwari, penelitian ini berpotensi menjadi rujukan bagi penyusunan strategi peningkatan kapasitas implementasi SIPD di daerah lain yang memiliki tantangan serupa. Hal ini dikarenakan diperlukan strategi untuk mendorong substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jaringan, partisipasi kelompok sasaran, dan sumber daya dalam implementasi kebijakan (Supandi et al., 2023).

I.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan teori implementasi Charles O. Jones (dalam Sri Maryuni, 2016) yang mencakup tiga variabel: organisasi, interpretasi, dan penerapan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan paradigma postpositivisme untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari.

Kabupaten Manokwari dipilih karena telah menerapkan SIPD sejak 2021, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian dilaksanakan pada Januari–Mei 2024, dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, termasuk proses pelaksanaan, aktor pelaksana, hambatan, serta solusi yang diterapkan. Informan dipilih secara purposive dari BAPPEDA, OPD, Dinas Kominfo, serta akademisi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Manokwari dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Charles O Jones, yang terdiri atas tiga dimensi utama: organisasi, interpretasi, dan aplikasi pada subbab berikut.

3.1 Organisasi

Dalam pelaksanaan SIPD, struktur organisasi pelaksana sudah terbentuk dan berada di bawah tanggung jawab BAPPEDA Kabupaten Manokwari. Terdapat tim implementor yang bertugas menjalankan sistem ini, mulai dari koordinator hingga staf pendukung dan verifikasi data. Namun, dari hasil penelitian diketahui bahwa meskipun struktur ini telah ada, implementasinya masih menemui berbagai kendala, terutama dari aspek kualitas sumber daya manusia. Tidak semua pegawai memiliki kapasitas teknis yang memadai dalam pengoperasian SIPD. Selain itu, pembagian tugas sering kali belum berjalan secara optimal karena beberapa perangkat daerah belum memiliki petugas khusus yang memahami SIPD, khususnya pada tingkat kecamatan dan dinas-dinas yang mengalami kesulitan teknis. Hal ini berdampak pada lambatnya penginputan data dan rendahnya keterisian dokumen perencanaan pembangunan dalam sistem.

3.2 Interpretasi

Pemahaman terhadap kebijakan dan standar operasional prosedur dalam SIPD masih belum merata di seluruh perangkat daerah. Meskipun telah dilakukan beberapa kali sosialisasi

dan bimbingan teknis, tidak semua pelaksana memahami substansi kebijakan secara mendalam. Hal ini terlihat dari masih adanya kebingungan dalam penyesuaian nomenklatur kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan dalam penggunaan fitur-fitur dalam SIPD. Beberapa OPD juga belum mengintegrasikan dokumen perencanaan mereka secara penuh ke dalam sistem, yang menandakan bahwa interpretasi terhadap tujuan dan mekanisme kebijakan belum sepenuhnya dipahami atau diterapkan.

3.3 Penerapan

Dalam aspek penerapan, pelaksanaan SIPD masih menghadapi hambatan teknis dan non-teknis yang cukup signifikan. Infrastruktur jaringan internet yang belum stabil di beberapa wilayah, terutama kecamatan terpencil, menjadi salah satu faktor utama penyebab lambatnya proses penginputan data. Selain itu, banyak perangkat daerah yang masih melakukan proses penatausahaan secara manual akibat kendala teknis sistem atau ketidaksiapan dalam beralih penuh ke sistem digital. Dukungan sarana dan prasarana yang terbatas, serta kurangnya pelatihan lanjutan, turut memperlambat pemanfaatan maksimal dari SIPD. Meskipun demikian, BAPPEDA Kabupaten Manokwari telah berupaya menjalankan program kerja yang mendukung implementasi SIPD, seperti pemetaan nomenklatur dan penyusunan jadwal input data.

3.4 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi

Faktor pendukung dalam implementasi SIPD di Kabupaten Manokwari meliputi adanya regulasi yang jelas baik di tingkat pusat maupun daerah yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan sistem ini. Selain itu, adanya komitmen dari pimpinan BAPPEDA untuk terus mendorong penggunaan SIPD serta pembentukan tim khusus implementor menjadi kekuatan internal yang cukup signifikan. Di sisi lain, dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan juga memberikan kontribusi positif.

Namun, terdapat pula berbagai faktor penghambat yang berasal dari kondisi internal maupun eksternal. Keterbatasan pemahaman pegawai terhadap mekanisme kerja SIPD menjadi kendala utama dalam operasionalisasi sistem ini. Selain itu, infrastruktur jaringan yang belum merata di seluruh wilayah kabupaten mengakibatkan tidak semua OPD dapat mengakses sistem secara lancar. Kurangnya koordinasi antar-perangkat daerah, tidak adanya standar operasional yang seragam, serta rendahnya akurasi dan keterbaruan data yang disampaikan, menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam pencapaian tujuan kebijakan SIPD.

3.5 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

Pemerintah Kabupaten Manokwari, khususnya BAPPEDA, telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi SIPD. Upaya langsung yang dilakukan antara lain berupa pelatihan dan sosialisasi kepada perangkat daerah secara berkala. Selain itu, dilakukan pula pendampingan teknis dan konsultasi lapangan oleh tim implementor SIPD agar setiap OPD dapat memahami serta menginput data dengan benar. Dalam kondisi darurat, proses input data dilakukan secara manual terlebih dahulu sambil menunggu perbaikan teknis sistem. Kemudian, pemerintah perlu memperketat kebijakan

melalui program yang tepat dan terevaluasi serta dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (Boa et al., 2025).

Sementara itu, upaya tidak langsung yang dilakukan antara lain adalah dengan menyusun petunjuk teknis tambahan, memetakan ulang nomenklatur program agar sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, serta menjalin koordinasi dengan instansi terkait untuk memperkuat jaringan internet dan sistem pendukung lainnya. Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus melakukan advokasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan dukungan teknis maupun pendanaan guna memperkuat implementasi SIPD secara menyeluruh. Sejalan dengan Asmawati dkk (2024) bahwa perlu adanya upaya yang dilakukan untuk memastikan keberlanjutan implementasi aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah dengan tetap melakukan koordinasi antar dinas terkait untuk memastikan SIPD berjalan dengan lancar.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini mengungkap bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Manokwari, khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan, masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami sistem secara teknis, belum optimalnya infrastruktur jaringan, serta kurangnya sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Temuan ini memperkuat hasil penelitian Tumija & Erlambang (2023), yang juga menemukan bahwa keterbatasan jaringan internet dan kapasitas SDM menjadi hambatan utama dalam implementasi SIPD di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan teknis dan kelembagaan masih menjadi isu dominan di berbagai daerah, termasuk di wilayah timur Indonesia.

Sama halnya dengan temuan Teken dan Romarina (2024), penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun SIPD telah berjalan sesuai regulasi nasional, efektivitasnya dalam pengelolaan perencanaan belum sepenuhnya optimal karena belum semua OPD memiliki pemahaman dan kesiapan teknis yang setara. Ini mengindikasikan bahwa keberadaan sistem belum secara otomatis meningkatkan kinerja perencanaan tanpa dukungan kapasitas kelembagaan yang memadai.

Namun, berbeda dengan temuan Karundeng dkk. (2021) yang menyebutkan bahwa SIPD di Kabupaten Sitara telah berjalan lancar meskipun belum memiliki regulasi lokal, penelitian ini menemukan bahwa justru ketiadaan regulasi daerah yang spesifik menjadi salah satu penyebab lemahnya penerapan SOP dan koordinasi antarpelaksana kebijakan di Kabupaten Manokwari. Kondisi ini memperlihatkan bahwa karakteristik kelembagaan lokal mempengaruhi efektivitas sistem, sehingga generalisasi penerapan SIPD perlu memperhatikan konteks masing-masing daerah. Temuan ini juga menolak sebagian hasil penelitian Arifin (2021) yang menyatakan bahwa integrasi dokumen perencanaan dan strategi kinerja organisasi berjalan baik di Kabupaten Jombang. Di Kabupaten Manokwari, integrasi antara dokumen RPJMD dan RKPD ke dalam SIPD masih belum optimal, terutama karena adanya tumpang tindih nomenklatur dan keterlambatan input data dari beberapa OPD. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh karakteristik wilayah, kesiapan infrastruktur digital, serta kemampuan manajerial antarlembaga pemerintah yang berbeda.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur mengenai implementasi SIPD, terutama dengan menyoroti konteks wilayah timur Indonesia yang sering kali menghadapi tantangan geografis dan digitalisasi yang lebih kompleks. Temuan ini memperkuat pentingnya dukungan kebijakan lokal, penguatan kapasitas SDM, serta peningkatan infrastruktur sebagai prasyarat utama keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Manokwari, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones, ditemukan bahwa aspek organisasi belum berjalan optimal akibat keterbatasan struktur kelembagaan dan jumlah personel yang menangani SIPD. Aspek interpretasi juga menunjukkan kesenjangan pemahaman antar pelaksana terhadap fungsi dan tujuan SIPD, yang berdampak pada ketidaktepatan pengisian data perencanaan pembangunan. Sementara pada aspek aplikasi, hambatan teknis seperti keterbatasan infrastruktur, ketidakstabilan jaringan, dan koordinasi antar OPD yang lemah menjadi faktor penghambat utama dalam penggunaan SIPD.

Meskipun telah dilakukan beberapa upaya perbaikan seperti pelatihan, pendampingan teknis, dan penyusunan SOP, pelaksanaannya belum mampu menjawab seluruh tantangan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, implementasi SIPD di Kabupaten Manokwari masih berada dalam tahap pengembangan dan memerlukan penguatan secara menyeluruh dari aspek kelembagaan, pemahaman sumber daya manusia, hingga dukungan teknis dan kebijakan yang lebih operasional. Penelitian ini menunjukkan pentingnya sinergi antara perangkat daerah, penyedia sistem, dan pemerintah pusat dalam memastikan keberhasilan sistem informasi yang akuntabel, efektif, dan berkelanjutan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Implikasi dari hal tersebut adalah pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi langsung dengan Pemerintah Pusat dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah (Fahzura & Najamudin, 2022).

Keterbatasan Penelitian. Pertama, ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada aspek perencanaan pembangunan dan belum mencakup keseluruhan modul dalam SIPD seperti penganggaran, pelaporan, dan evaluasi. Kedua, keterbatasan waktu dan akses menyebabkan jumlah informan yang diwawancarai terbatas pada OPD tertentu yang aktif dalam proses perencanaan, sehingga belum mewakili keseluruhan perangkat daerah secara menyeluruh. Ketiga, kondisi geografis dan infrastruktur di Kabupaten Manokwari juga menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan observasi dan pengumpulan data secara langsung, khususnya pada perangkat daerah di wilayah pinggiran. Keempat, data sekunder yang digunakan sebagian besar bersumber dari dokumen internal pemerintah daerah yang belum seluruhnya

terdigitalisasi atau terdokumentasi dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap kelengkapan dan kedalaman analisis.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan peraturan mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Mnaokwari untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. D. (2025). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Studi Kasus Tahapan Perencanaan Penganggaran di Kabupaten Ciamis). Retrieved from Repository Universitas Jenderal Soedirman website: <https://repository.unsoed.ac.id/31659/>
- Arifin, A. R. P. (2021). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap efektivitas perencanaan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang* (STIE Dewantara Jombang). STIE Dewantara Jombang. Retrieved from <https://repository.stiedewantara.ac.id/handle/123456789/847>
- Asmawati, N., Suparman, S., & Gunawan, H. (2024). Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat. *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1308–1314. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3376>
- Bancin, M. R. H., Lubis, T. A., Juanda, R. A., & Sari, E. N. (2024). Implementation and effectiveness of local government information systems (SIPD) in Indonesia: A literature study. *Proceeding Medan International Conference on Economic and Business*, 2(0), 1901–1919. <https://doi.org/10.30596/miceb.v2i0.897>
- Boa, H., Suwannathep, S., Gunawan, B. I., & Bunnag, B. (2024). Pond farmers' and stakeholders' satisfaction in the Mangrove Planting Program in the Mahakam Delta, Indonesia. *GMPI Conference Series*, 18(2), 68–79. <https://doi.org/10.53889/gmpics.v3.422>
- Chairina, F., & Wehartaty, T. (2019). PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BPKPD KOTA SURABAYA. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 11(1), 31–39. <https://doi.org/10.33508/jako.v11i1.2073>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH di INDONESIA. *LAW REFORM*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Daraba, D., Salam, R., Wijaya, I. D., Baharuddin, A., Sunarsi, D., & Bustamin, B. (2023). MEMBANGUN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF DAN EFISIEN DI ERA DIGITAL DI INDONESIA. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5(1), 31–40. <https://doi.org/10.61076/jpp.v5i1.3428>
- Dione, F. (2020). Implementation of regional development information system (SIPD) in

- increasing coordination of regional development. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1), 21–28. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1061>
- Fahzura, L., & Najamudin, N. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(1), 7–13. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i1.33>
- Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. *Information Systems Management*, 29(4), 258–268. <https://doi.org/10.1080/10580530.2012.716740>
- Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, S. E. (2021). Implementasi kebijakan sistem informasi pemerintahan Daerah (sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *GOVERNANCE*, 1(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36315>
- Maulydiana, B., & Simangunsong, F. (2021). IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2020 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. *Visi Sosial Humaniora*, 2(1), 44–54. <https://doi.org/10.51622/vsh.v2i1.334>
- Muttaqin, I., Adiranti, U., & Dewi Zakiyah, R. (2023). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kota Probolinggo. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 9(1), 2310–2318. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol9.iss1.2023.1484>
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Phaphoom, N., Wang, X., Samuel, S., Helmer, S., & Abrahamsson, P. (2017, December 2). A survey study on major technical barriers affecting the decision to adopt cloud services. Retrieved from arXiv.org website: <https://arxiv.org/abs/1712.00606>
- Supandi, D., Wasistiono, S., Madjid, U., & Pitono, A. (2023). Policy implementation of the village building movement in West Java Province. *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS*, 06(08). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i8-63>
- Teken, I. K. A., & Romarina, A. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar. *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, 4(2), 111–123. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4419>
- Triwahyuni, F., & Fatmawati, Y. (2024). ANALISIS TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH REPUBLIK INDONESIA (SIPD RI) UNTUK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR. *Nusantara Hasana Journal*, 4(5), 58–71. <https://doi.org/10.59003/nhj.v4i5.1249>
- Tumija, T., & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi*, 5(2), 155–169. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3696>
- Yulivestra, M., Zauhar, S., Wijaya, A. F., & Hidayati, F. (2025). Factors cause the failure of policy implementation of traditional customary governance system (Nagari) in West Sumatera Province, Indonesia. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(5), 1274–1281. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i5.7136>